

## DPRD setuju pertanggungjawaban APBD 2020



**Sumber gambar:**

<https://kalsel.antaranews.com/berita/264550/dprd-setujui-pertanggungjawaban-apbd-2020>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Kalimantan Selatan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) 2020 setelah melalui proses dan tahapan pembahasan.

"Secara Substansi, Raperda ini merupakan hasil perhitungan dari Audit Badan Pemeriksa Keuangan maka semua realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang kami sampaikan tentunya sama persis dengan hasil audit BPK-RI," ujar Bupati H Abdul Wahid HK di Amuntai, Kamis (1/7). Wahid bersyukur, untuk hasil pemeriksaan terhadap Laporan pengelolaan Keuangan Daerah di 2020 oleh BPK RI, Pemkab HSU kembali menerima penilaian (Opini) Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP untuk keenam kalinya.

Pada Rapat Paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 di Ruang Rapat DPRD, disetujui realisasi Pendapatan berjumlah Rp1.231.664.954.683,34 dan Belanja Rp1.246.904.952.682,00 dengan Defisit Anggaran Rp15.239.997.993,66.

Pada Pos Pembiayaan, realisasi Penerimaan berjumlah Rp. 197.335.129.559,36 dan realisasi Pengeluaran berjumlah Rp0 (nol) sehingga diperoleh Netto pada Pembiayaan sebesar Rp197.335.129.559,36. Disampaikan, terdapat sisa lebih

pembiayaan untuk tahun anggaran berkenaan berjumlah Rp182.095.131.560. Wahid bersyukur dan berterima kasih atas kerja sama pihak legeslatif sehingga semua tahapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 tidak melebihi waktu yang disediakan.

Dikatakan, sesuai ketentuan Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembahasan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dibatasi paling lama, hanya satu bulan sejak disampaikan ke DPRD.

"Sehingga dengan dilaksanakannya Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan pada hari ini, maka batas waktu tersebut tidak terlampaui," kata Wahid.

Sebelumnya, Juru Bicara Badan Anggaran H. Ahmad Al Gifari menyampaikan laporan pembahasan terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 dan menyampaikan masukan saran lainnya bagi pemerintah daerah. Ketua DPRD Almien Ashar Safari menyampaikan, pada prinsipnya Dewan dapat menerima dan menyetujui Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 dan ditetapkan menjadi keputusan DPRD HSU nomor 07 tahun 2021 pada tanggal 01 Juli 2021.

"Atas nama pimpinan DPRD Hulu Sungai Utara, saya menyampaikan terima kasih kepada anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara beserta jajaran atas kerja sama para rapat-rapat pembahsan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksaaan APBD 2020 selama ini," katanya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/264550/dprd-setujui-pertanggungjawaban-apbd-2020> , DPRD setuju pertanggungjawaban APBD 2020, 2 Juli 2021.
2. <https://www.hsu.go.id/web/dprd-hsu-setujui-pertanggungjawaban-apbd-2020/> , 9 Juli 2021.

#### **Catatan:**

Kegiatan belanja tidak hanya dilakukan pada pemerintah pusat, melainkan juga di daerah. Kegiatan belanja yang dilakukan pemerintah daerah disebut sebagai belanja daerah. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Rencana belanja daerah disusun setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Belanja daerah dalam APBD tersebut digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah. Adanya belanja daerah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam hal pemberian wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat daerahnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas empat jenis.

- Belanja Operasi Dilansir dari buku Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual (2015) karya Erlina, Omar Sakti, dan Rasdianto, belanja operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- Belanja pegawai Belanja pegawai adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan imbalan berupa kompensasi dalam bentuk uang atau barang. Kompensasi tersebut diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, pensiunan, serta pegawai honorer yang bertugas di dalam maupun di luar negeri. Kompensasi diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah daerah. Contoh belanja pegawai adalah belanja gaji, belanja tunjangan, uang makan, uang lembur PNS, dan sebagainya.
- Belanja barang dan jasa Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembelian barang atau jasa habis pakai yang digunakan dalam proses produksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Termasuk juga pengadaan barang yang kemudian akan dijual kepada masyarakat. Contoh belanja barang dan jasa adalah belanja keperluan perkantoran, sewa gedung, pembayaran listrik, dan lain-lain.
- Belanja hibah, Belanja hibah adalah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan mengalihkan hak dalam bentuk uang, barang, maupun jasa berupa transfer. Belanja hibah bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, tidak perlu dibayar kembali, dan tidak terus-menerus dilakukan.
- Belanja bantuan social, Belanja bantuan sosial adalah pemberian barang atau jasa oleh pemerintah daerah kepada masyarakat guna menghindari kemungkinan risiko sosial yang merupakan peristiwa pemicu terjadinya kerentanan sosial. Contoh belanja bantuan sosial adalah belanja jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan lain-lain.
- Belanja modal adalah jenis pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri atas belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tidak berwujud.

- Belanja tidak terduga, Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran pemerintah daerah untuk keperluan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Contoh belanja tidak terduga adalah belanja penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan sebagainya.
- Belanja transfer, Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: Belanja bagi hasil Belanja bagi hasil adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota atau pendapatan daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Termasuk juga pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan peraturan undang-undang.